

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
UMKM DI DESA SUKARAJA KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD DERAJAD RITONGA
NPM : 1403100194

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : AHMAD DARAJAD RITONGA

NPM : 1403100194

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NO 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DI DESA SUKARAJA KEC. AIR PUTIH KAB. BATU BARA

Medan, April 2018

Pembimbing



Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd



Dekan,



Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : **AHMAD DARAJAD RITONGA**
NPM : 14031000194
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

()

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**

()

PENGUJI III : **Dr. MOHD YUSRI ISFA., M.Si**

()

PANITIA UJIAN

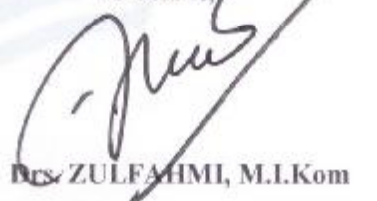
Ketua,



Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **AHMAD DERAJAD RITONGA**, NPM : 1403100194 menyatakan dengan sungguh – sungguh :


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 14 Maret 2018

METERAI
TEMPEL
31695AFF134273612
6000
TUANGRU RUPIAH

Yang menyatakan,

AHMAD DERAJAD RITONGA



Unggul, Cerdas, Berpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ahmad Derajat Ritonga
NPM : 14031001514
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi program daerah Kabupaten Batu bara tahun 2014 tentang Pengalokasian usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka pengembangan usaha UMKM Di Desa (Luberaja Kecamatan Air Putih Kabupaten

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	24 Januari 2018	Acc Draft wawancara	[Signature]
2	21 Februari 2018	x Perbaikan latar belakang masalah	[Signature]
3	22 Februari 2018	x Perbaikan penulisan	[Signature]
4	1 Maret 2018	x Perbaikan latar belakang masalah x Perbaikan bab 2 x Perbaikan penulisan x Perbaikan bab 3	[Signature]
5	2 Maret 2018	x Perbaikan bab 3 dan bab 4	[Signature]
6	5 Maret 2018	x Perbaikan bab 4	[Signature]
7	7 Maret 2018	x Perbaikan abstrak x Perbaikan kesimpulan	[Signature]
8	12 Maret 2018	x Perbaikan penulisan x Acc skripsi	[Signature]

Medan,20.....

Dekan,
[Signature]
Dr. Rudianto, M.Si

Ketua Program Studi,
[Signature]
Nalia Khairiah S.I.P.M.P.D

Pembimbing ke :
[Signature]
Dr. Mohd. Yusri, M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Komunika pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM Di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda penulis Paharuddin Ritonga, S.Ag dan Ibunda tercinta Elyanora Nasution yang telah memberikan kasih sayangnya berupa bimbingan, semangat serta doa yang tak berhenti mengiringi langkah penulis. Terimakasih atas pendidikan hidup dan pengorbanan yang telah mereka dedikasikan dengan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mohd Yusri, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran memberikan bimbingannya kepada penulis.
6. Dosen – dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga, kerabat dan saudara penulis yang selalu setia dalam memberikan nasihat dan doa selama menyusun skripsi.
8. Kakak penulis Putri Nanda Ritonga ,Adik penulis Dinda Yolanda Ritonga yang selalu setia memberi semangat dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat yang penulis sayangi yaitu Muhammad Arief Adillah, Muhammad Khusairy, Reki Fandy Siagian, Rima Meilinda Siregar, Fitri Sandy, Putri Fatinna Ziha dan Ulfa Mawaddah dan Retno Widya Ningrum yang telah banyak menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman – teman seperjuangan yang memberikan semangat satu sama lainnya selama menyusun skripsi.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar– besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 14 Maret 2018

Yang menyatakan,

Penulis

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DI DESA SUKARAJA KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA

**OLEH :
AHMAD DERAJAD RITONGA
NPM : 1403100194**

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral masyarakat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapabilitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang dimungkinkan karena UMKM memiliki ciri antara lain struktur organisasi dan tenaga kerja yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Selain itu, kemampuan ini juga menjadi dasar bahwa pengembangan UMKM dapat menjadi program utama dalam pembangunan prekonomian masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Adapun proses penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yaitu tidak adanya penyampaian informasi kebijakan untuk masyarakat. Adapun dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan seperti (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas maupun informasi dan wewenang). Sejauh ini sumber daya yang diberikan pemerintah dalam bentuk fasilitas sudah terlaksana dengan baik. Adapun tanggung jawab sudah berjalan dengan baik, karena adanya dukungan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan UMKM di Desa Sukaraja. Kemudian terkait dengan struktur birokrasi tersebut sudah berjalan dengan baik, karena adanya struktur birokrasi sudah berjalan baik didesa kecamatan Suka Raja. Adapun terkait dengan industri kreatif tersebut sudah berjalan dengan baik, karena adanya struktur birokrasi sudah berjala baik didesa kecamatan Suka Raja. Adapun terkait dengan SDM yang lebih maju tersebut sudah berjalan dengan baik karna sudah dilakukan pembinaan rutin, dan sudah memberikan pelatihan atau motivasi agar SDM bisa lebih maju. Adapun terkait dengan UMKM yang kompeten tersebut sudah berjalan dengan baik. Dengan memberikan konsistensi dari segi rasa dan penampilan yang dipertahankan untuk menjadi pembeda dengan Produk lainnya.

Kata kunci : Implementasi, Pengembangan UMKM

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Implementasi	6
B. Pengertian Kebijakan.....	7
C. Pengertian Kebijakan Publik	8
1. Tujuan Kebijakan Publik.....	9
2. Cirri-ciri Kebijakan Publik.....	10
3. Jenis Kebijakan Publik.....	11
4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	12
D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	15
F. Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).....	20
G. Pengertian Pengembangan.....	22
H. Pengertian Industri Kreatif.....	23
I. Pengertian Sumber Daya Manusia.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Kerangka Konsep	27
C. Defenisi Konsep	28
D. Kategorisasi	29
E. Narasumber	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	34
1. Sejarah Desa Sukaraja.....	34
2. Visi dan Misi Kantor Desa Sukaraja	34
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	35
4. Struktur Organisasi Desa Sukaraja.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan57

B. Saran58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi.....	29
Tabel 4.1 Jumlah UMKM di Desa Sukaraja.....	41
Table 4.2 Rata-rata Pendapatan UMKM.....	41
Table 4.3 Data Pelatihan UMKM.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep.....	27
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Desa Sukaraja.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti ketika Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi tahun 1997/1998. Perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan mampu bertahan ketika itu, ternyata banyak yang gagal. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan krisis.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, memainkan peran yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja, modal yang relatif kecil. Selain dari itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih sekaligus juga bisa menjadi ciri khas identitas suatu daerah dari hasil produksinya.

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral masyarakat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapabilitas.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang dimungkinkan karena UMKM memiliki ciri antara lain struktur organisasi dan tenaga kerja yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Selain itu, kemampuan ini juga menjadi dasar bahwa pengembangan UMKM dapat menjadi program utama dalam pembangunan prekonomian masyarakat.

Tetapi kondisi ini terbanding terbalik dengan pelaku UMKM yang ada di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Dimana permasalahan yang terjadi kurangnya kreatif dalam melakukan usaha, berlebihnya tenaga kerja dalam melakukan usaha UMKM, dan UMKM yang tidak mempunyai struktur kedepan dalam menghadapi perubahan pasar.

Hal ini mengakibatkan UMKM di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara belum mampu bersaing dan memberikan corak khusus bagi masyarakat bahwa usaha UMKM yang mereka lakukan sebuah identitas masyarakat Desa Sukaraja dalam melakukan persaingan dalam berusaha.

Melihat permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro kecil dan menengah di atas, di butuhkan peran dari kelembagaan pemerintah daerah yaitu dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Batu Bara yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Disini letak peran penting kelembagaan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara .

Dimana letak peran penting itu ialah menyelesaikan permasalahan pelaku UMKM Desa Sukaraja dengan memberikan pelatihan. Pelatihan untuk menjadikan pelaku UMKM menjadi industri yang kreatif , menjadikan SDM yang memiliki skil/kemampuan, dan UMKM yang dapat bersaing dalam perubahan pasar.

Jika peran pemerintah ini dilakukan maka UMKM desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara akan memiliki potensi yang baik dalam persaingan dalam melakukan usaha UMKM. Dan memiliki ciri khas lokal yang terbentuk melalui produk-produk UMKM yang kreatif.

Sedangkan data Dinas Koperasi dan UMKM menyebutkan UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif atau biasa disebut industri kreatif di Kabupaten Batu Bara cukup banyak memiliki beberapa dokumen dan profil industri menurut cabang industri yang ada, sayangnya hingga saat ini Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih belum mengelompokkan industri berdasarkan pada kelompok sektor industri kreatif. Sehingga, jumlahnya belum dapat terdefiniskan secara jelas. Pengembangan potensi industri kreatif ke depannya akan tetap menjadi sebuah alternatif penting dalam meningkatkan kontribusi di bidang ekonomi dan bisnis,

Berdasarkan masalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di atas, maka penulis ingin meneliti tentang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan judul : Implementasi Peraturan Daerah Kab. Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka

Pengembangan Usaha UMKM di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Perauran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM Di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

- 1) Bagaimana implementasi perauran daerah kabupaten batu bara No. 11 tahun 2014 tentang pengelolaan usaha mikro keil dan menengah dalam rangka pengembanga UMKM di desa sukaraja kecamatan air putih kabupaten batu bara.
- 2) Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pengembangan usaha UMKM di desa sukaraja kecamatan air putih kabupaten batu bara.
- 3) Apa peranan pemerintah kabupaten batu bara dalam pelaksanaan pengembangan usaha UMKM di desa sukaraja kecamatan air putih kabupaten batu bara.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

- 2) Bertambahnya ilmu pengetahuan penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dan kemampuan analisis penulis
- 3) Sebagai bahan masukan atau saran kepada pelaku usaha UMKM yang dapat mengoptimalkan perannya sebagai pencipta sumber daya manusia yang mandiri dikemudian hari.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Berisikan uraian teori yang menguraikan pengertian implementasi , pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, pengertian UMKM, pengertian Pengembangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Persiapan dan pelaksana penelitian menguraikan metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kategorisasi, kerangka konsep, definisi konsep, narasumber, dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian menguraikan penyajian data, analisis data.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Wahab (2008:23) Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu berupa undang-undang, peraturan daerah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan desa, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Grindle (2006:23) Implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program disesuaikan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tercapai. Proses Implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan social yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang positif maupun yang negatif .

Wahab (1997:63) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

B. Pengertian Kebijakan

Kebijakan secara estimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijakan berawal dari kata “wisdom”.

Budiardjo (2000:12) menyatakan kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil seorang pelaku atau kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu kebijakan menurut Budiardjo memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaan dan penerapannya.

Wahab (2001:3) mengemukakan bahwa merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijakan menurut Wahab merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan pemahaman Budiardjo dan Wahab mengemukakan 3 hal yang bisa diamati yaitu: pertama, bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang dipikirkan atau dilakukannya. Kedua, harus kita bedakan secara tegas antar kebijakan (policy) dan keputusan (decision), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya

pemilihan diantara sejumlah alternatif (dianggap) tersedia. Ketiga, jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat problem solving (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (governmental agenda).

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Budiardjo (2000:12) menyatakan kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu .friedrich (2007:09) menyatakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan

adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Jenkins (2001:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang sering berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan pada aktor-aktor tersebut.

Agustino (2008:7) mengemukakan kebijakan publik adalah sebagai rangkaian kegiatan-kegiatan panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Menurut Solly (2007:09) kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Sedangkan Budiardjo (2002:12) kebijakan public adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kepala politik dalam uaha memilih tujuan dan cara-cara mencapa tujuan tertentu.

1. Tujuan Kebijakan Publik

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu;

- a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)

- b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator)
- c. Memadukan berbagai aktifitas (Negara sebagai coordinator)
- d. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor).

2. Ciri-ciri kebijakan publik

Ciri adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu, orang mengenal sesuatu berdasarkan keterangan tersebut. Demikian pula dengan kebijakan publik tanpa mengetahui sifat khusus atau ciri-ciri dari kebijakan, sulit membedakan antara kebijakan dengan keputusan, tetapi tidak semua keputusan merupakan kebijakan.

Menurut Anderson (2003: 22) mengemukakan beberapa ciri-ciri dari kebijakan publik sebagai berikut:

- a. *Public policy is purposive, goal-oriented behaviour rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan publik harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan publik tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada Kebijakan.
- b. *Public policy consists of courses of action – rather than separate, discrete decision, or actions – performed by government officials.* Artinya suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegak hukum.

- c. *Policy is what government do – not what they say will do or what they inted to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakuka oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau di kehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- d. *Public policy may either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negative atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan memaksa masyarakat mengikutinya.

3. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (2012:22), kebijakan publik dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. *Substantive Policies and Procedural Policies.*

Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya : kebijakan politik luar negeri, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substansi policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan. *Procedural Policies* adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

- b. *Distributive, Redistributive, and self Regulatory Policies.*

Distibutive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. *Redistributive Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk. *Self Regulatory Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

- c. *Material Policies* adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

- d. *Publik Goods and Private Goods Policies*

Publik Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dari pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak.

- e. *Private Goods Policies* merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

- a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu

mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:01) Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan keputusan di antara pembentukkan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, kelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, Model George C Edwards III (2006:150) memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

1. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll.

Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi antara lain

- a. *Transmisi*, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
- b. *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
- c. *Konsistensi*, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

2. Sumber daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan. Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh George C. Edward III (2006: 152-153).

- a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

b. Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri. Manipulasi intensif yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi.

d. Strukur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward III (2006:153) yaitu:

1) *Standard Operational Procedures (SOP)*

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup:

- a) Kepentingan kelompok sasaran atau target *groups* termuat dalam isi kebijakan. Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat atau kelompok banyak sekali masalah yang membelenggu dan butuh kebijakan yang dibuat pemerintah. Disini kebijakan yang sangat dibutuhkan harus terlaksana agar mengeluarkan masyarakat dari masalah tersebut.
- b) Jenis manfaat yang diterima oleh target *group*. Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima masyarakat

atau kelompok tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.

- c) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya.
 - d) Ketepatan sebuah program. Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.
 - e) Rincian implementor kebijakan. Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya. Karena peran implementor sangat penting, tanpa mereka implementasi kebijakan tidak berjalan. Implementor tak cuma satu tapi ada beberapa, maka harus lengkap karena masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi.
 - f) Dukungan dari sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia (implementor) harus memadai dan tahu peran dan fungsinya secara baik agar tidak keliru. Selain itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi kebijakan.
2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*), mencakup:
- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor

kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.

- b) Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa. Dalam politik negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara.
- c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam impementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.

Dari teori George C. Edwards III mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peneliti akan menggunakan teori milik George C. Edward III untuk landasan teori penelitian ini. Selain lebih cocok menggunakan model George C. Edwards III , teori ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dan jelas untuk digunakan untuk pembahasan penelitian ini.

F. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki defenisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-

Undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
 - a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiiki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) samapi dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Jadi pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

G. Pengertian Pengembangan

Menurut Komaruddin Sastradipoetra (2006:122) sedikitnya ada dua buah definisi yang menjelaskan arti pengembangan:

1. Pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang yang meliputi pengajaran dan praktek sistematis yang menekankan pada konsep-konsep teoritis dan abstrak yang dilakukan oleh para penyelia (supervisor)

2. Pengembangan mengacu pada hal yang berhubungan dengan penyusunan staf dan personalia, adalah proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi yang dengan prosedur itu personalia manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.

Menurut Robert L. Mathis dan Jhon H. Jackson (2006:350) pengembangan (*development*) mewakili usaha-usaha meningkatkan kemampuan para karyawan untuk mengenai beraneka tugas dan untuk meningkatkan kapabilitas diluar kapabilitas yang dibutuhkan oleh pekerjaan saat ini.

Menurut Malayu (2000:68) pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan.

Jadi, pengertian pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapabilitas.

H. Pengertian Industri Kreatif

Menurut Departemen Perdagangan RI (2009:5) Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat

individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Simatupang (2008 :69) juga menjelaskan bahwa industri kreatif adalah industri yang mengandalkan talenta, ketrampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Sementara itu, di kalangan para pakar dalam bidang tersebut, nampaknya tidak ada perbedaan pengertian yang mendasar antara Ekonomi Kreatif dengan Industri Kreatif. Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis, sebenarnya bukan merupakan persoalan yang serius. Secara umum dapat dikatakan bahwa keduanya mengandung pengertian sebagai aktivitas berbasis kreativitas yang berpengaruh terhadap perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa industri kreatif adalah sebagai aktivitas berbasis kreativitas yang berpengaruh terhadap perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.

I. Pengertian Sumber Daya Manusia

Werther dan Davis (1996) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya manusia adalah kontribusinya terhadap organisasi sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi.

Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndraha (1999) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif generative inovatif dengan menggunakan energy tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination: tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.

Dengan berpegang pada definisi diatas, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power). Pendapat ini relevan dalam kerangka berpikir bahwa sumber daya harus ditingkatkan kualitas dan kompetensi agar menjadi sebuah kekuatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan.

Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jadi data deskriptif adalah sebuah indicator bagi normal-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan prilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau prilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

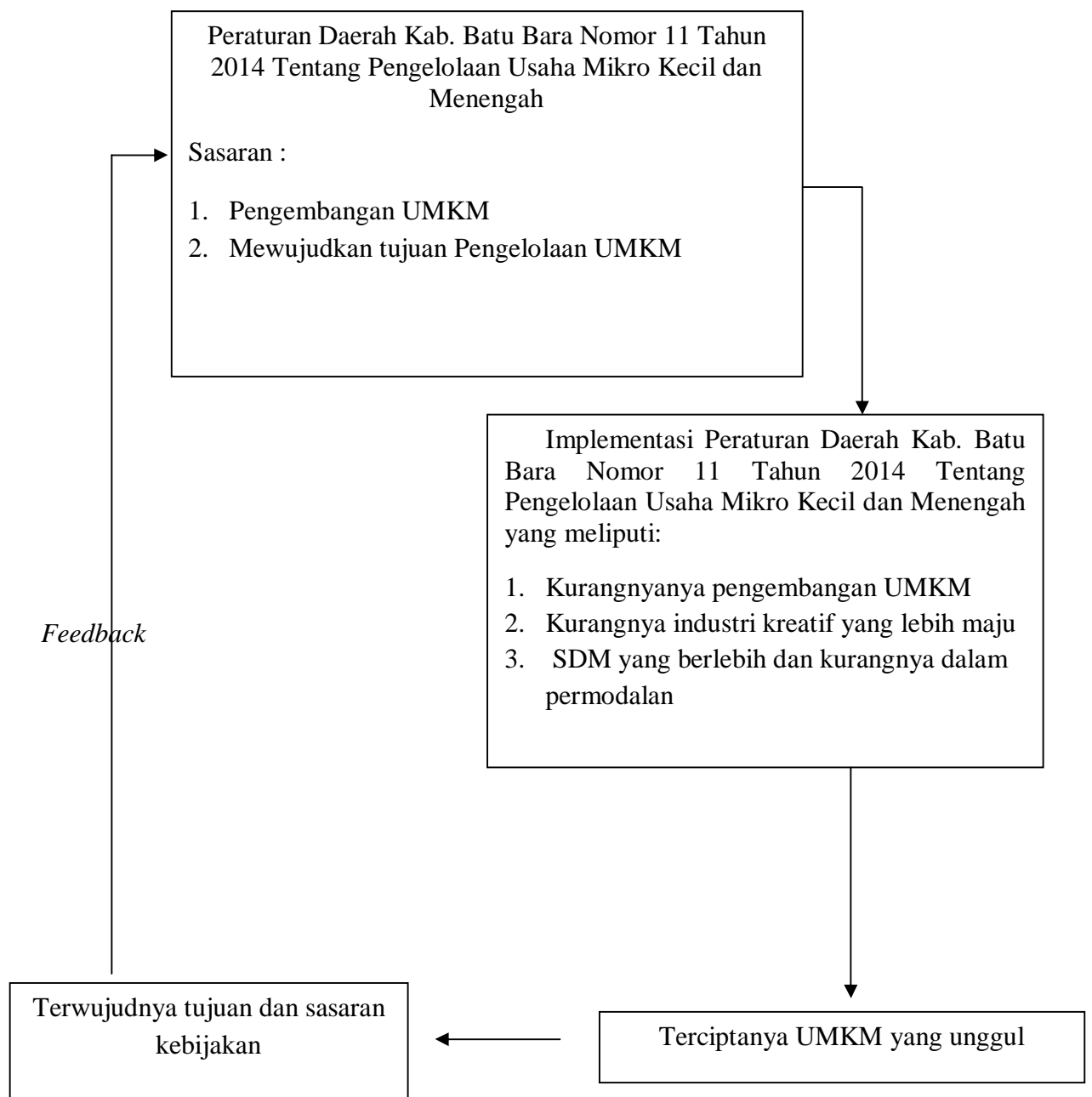
Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kab. Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan Usaha UMKM di Desa Sukaraja Kec. Air Putih Kab. Batu Bara.

B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



C. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian keadaan, kelompok atau individu menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita- cita yang diinginkan dan kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain yang berupa peraturan-peraturan , keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat sehingga mencapai masyarakat yang sejahtera.
3. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan pemerintah yang terstruktur agar mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah publik.
4. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih tidak kurang.

5. UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
6. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapabilitas.
7. Industri kreatif adalah sebagai aktivitas berbasis kreativitas yang berpengaruh terhadap perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.
8. Sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyampaian informasi 2. Adanya sumber daya yang dimiliki 3. Adanya disposisi (sikap) 4. Adanya struktur birokrasi

2	Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya industri kreatif 2. Adanya SDM yang lebih maju 3. Adanya UMKM yang kompeten
---	--------------	---

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Implementasi Perauran Daerah Kabupaten Batu Bara No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM Di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Sukaraja Kec. Air Putih Kabupaten Batu Bara

- a. Nama : Budiono
- b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
- c. Jabatan : Kepala Desa
- d. Umur : 48 Tahun

2. Ketua PKK

- a. Nama : Elyanora Nasution
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Jabatan : Ketua PKK
- d. Umur : 52 tahun

3. Pemilik UMKM

- a. Nama : Narman
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Umur : 53 Tahun

4. Pekerja UMKM

a. Nama : Juniarti

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Umur : 46

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan, dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang digunakan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Adapun data primer terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara yaitu Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dalam mengenali informasi dengan jalan tatap mukaapa yang diperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan melalui sumber yang berkompeten.

b. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian.

2. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan penelitian menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lain. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Analisis data dimulai dengan mencari data yang ada yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi gambar dan sebagainya.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

H. Lokasi dan Waktu penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang dilakukan pada bulan Januari 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Suka Raja

Kabupaten Batu Bara adalah kabupaten pemekaran dari kabupaten Asahan. Masyarakat yang menuntut dibentuknya Kabupaten Batu Bara yang menamakan diri sebagai GEMKARA “Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batu Bara”. Kabupaten batu bara akhirnya terbentuk setelah pihak legislatif (DPR-RI) dalam sidang paripurna pada hari Jum’at tanggal 8 Desember 2006, membahas tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara dan dinyatakan sah menjadi sebuah Kabupaten melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara Dan Lampiran Negara Nomor 7 Tahun 2007

Kemudian terbentuklah Desa Suka Raja pada tahun 2008 yang terletak di Kecamatan Air Putih. Adapun masyarakat terdiri dari beberapa suku di Indonesia seperti suku Mandailing, suku Jawa. Setelah itu masyarakat mulai ramai menempati desa Suka Raja. Sampai saat ini umur kabupaten Batu Bara yaitu adalah 12 tahun. Dengan kebijakan dan peraturan yang dapat membangun sumber daya manusia yang potensial. Hal ini berkembang sampai kebijakan-kebijakan yang ada di desa dan perkembangan desa kearah yang lebih berkembang dan maju.

2. Visi Dan Misi Desa Pasar Baru

a. Visi

Melayani masyarakat Desa Suka Raja demi terwujudnya desa Suka Raja yang Maju, Mandiri, Sehat, Pintar Dan Sejahtera

- 1) Maju : masyarakat yang memiliki daya saing baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
- 2) Mandiri : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia
- 3) Sehat : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang sehat
- 4) Pintar : Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan menciptakan generasi yang unggul, cerdas dan terampil
- 5) Sejahtera : mencapai kehidupan yang bahagia serta dapat mencukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan)

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Suka Raja

- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Suka Raja dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Suka Raja dalam berbagai bentuk kegiatan.
- 6) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat desa Suka Raja.
- 7) Melaksanakan kegiatan pembangunan dengan jujur, baik dan transparan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Desa

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan

- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
 - a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
 - e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan (Kaur) Umum

- 1) Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- 2) Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan

- 2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- 4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- 5) Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- 6) Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kaur Keuangan

- 1) Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- 2) Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - 2) Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

e. Kaur Pemerintahan

- 1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
- 2) Fungsi :
 - a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan

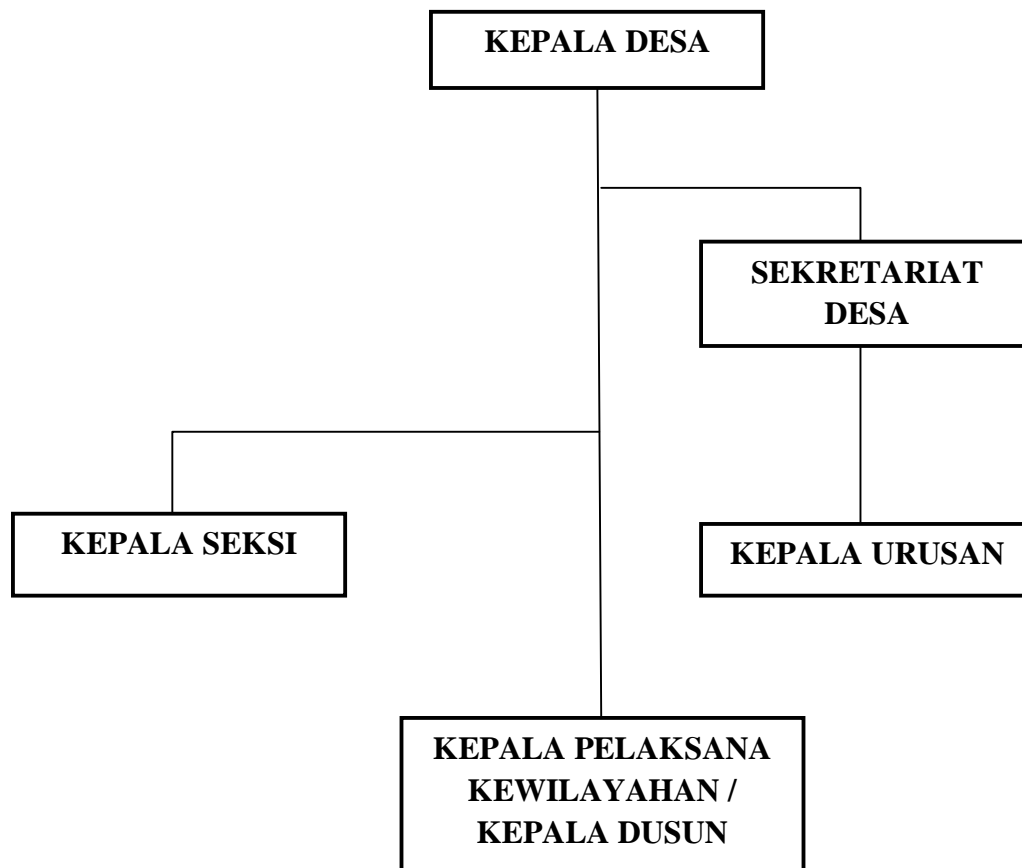
- b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

4. Struktur Organisasi Desa Suka Raja

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi. Bagan organisasi ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun struktur organisasi di Desa Suka Raja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Sumber : Desa Suka Raja 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa.

Adapun data yang diperoleh yaitu Jumlah UMKM Di desa Suka Raja adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah UMKM di Desa Suka Raja 2014-2017

NO	TAHUN	JUMLAH UMKM	JUMLAH PEMILIK UMKM
1	2014	47	47
2	2015	52	58
3	2016	58	63
4	2017	65	77

Sumber: Desa Suka Raja 2018

Adapun data yang diperoleh yaitu rata-rata pendapatan UMKM/bulan antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rata-rata pendapatan UMKM/bulan Desa Suka Raja 2014-2017

NO	Rata/rata Pendapatan Pemilik/Bulan	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata pendapatan tenaga kerja/bulan
1	4 juta	135 orang	600 ribu

2	4,3 juta	138 orang	640 ribu
3	4,7 juta	142 orang	665 ribu
4	5,2 juta	150 orang	688 ribu

Sumber : Desa Suka Raja

Tabel 4.3

Data Pelatihan UMKM yang telah mengikuti Sosialisasi Tahun 2017

No	Nama diklat	Jenis Usaha			Pelaksana
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Sosialisasi pengembangan UKM	5	3	2	Dinas Koperasi Kabupaten Batu Bara
2	Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha	3	-	-	Dinas Koperasi Kabupaten Batu Bara
3	Sosialisasi pengembangan bagi UMKM	50	35	15	Badan Penanaman Modal Daerah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Batu Bara
4	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha	130	-	-	Dinas Koperasi Kabupaten Batu Bara

Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Batu Bara

B. Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan para narasumber penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Adanya Penyampaian Informasi

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 09:00 WIB dengan bapak Budiono selaku Kepala Desa Suka Raja dengan cara pemerintah menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, tidak ada cara khusus dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan ini. Cara penyampaian informasi melalui surat yang diberikan dari dinas Koperasi yang kemudian dibagikan pada setiap desa yang ada di kecamatan Air Putih Adapun bentuk sosialisasi untuk masyarakat diberikan himbauan-himbauan bahwasanya UMKM berguna untuk memajukan masyarakat desa Suka Raja.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 10:00 WIB dengan ibu Elyanora Nasution selaku Kepala PKK dengan cara pemerintah menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolafan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, tidak ada cara khusus dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan ini cara penyampaian biasanya ada penyuluhan dari Kepala Desa tetapi bukan perda yang terkait melainkan penyuluhan UMKM yang mengundang beberapa anggota UMKM.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 pukul 14.00 WIB dengan ibu Juniarti selaku Masyarakat yang mengikuti kegiatan UMKM bahwasanya beliau tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, kemudian cara Kepala Desa menyampaikan perda yaitu

cara melalui sosialisasi dan mendatangi tempat mereka bekerja, adapun bentuk solusi yang diharapkan pemerintah mampu memberi pelatihan dan sosialisasi bagi mereka yang berwirausaha.

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2018 pukul 15.00 WIB dengan bapak Narman selaku pemilik UMKM bahwasanya beliau tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, kemudian cara Kepala Desa menyampaikan perda yaitu cara melalui sosialisasi dan mendatangi tempat mereka bekerja, adapun bentuk solusi yang diharapkan pemerintah mampu memberi pelatihan dan sosialisasi bagi mereka yang berwirausaha.

Sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut yaitu tidak adanya penyampaian informasi kebijakan untuk masyarakat. Menurut Edwards III (2006:150) untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial, dan lain-lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara pemerintah menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih perlu adanya pembinaan dan sosialisasi agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 09:00 WIB dengan bapak Budiono selaku Kepala Desa Suka Raja mengatakan dukungan sumber daya dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, tetapi dalam pengelolaannya mereka belum terlalu bisa mengembangkan sebab ilmu mengenai usaha yang mereka miliki belum terlalu banyak. Adapun peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat yaitu dengan cara memanggil masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah mengenai usaha kecil yang diadakan rutin setiap bulannya. Kemudian beliau mengatakan sangat perlu adanya pelatihan karena pelatihan itu merupakan dasar ilmu yang digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 10:00 WIB dengan ibu Elyanora Nasution selaku Kepala PKK mengatakan dukungan sumber daya dalam menjalankan kebijakan tidak cukup baik, SDM dan SDA yang tidak memadai. Kemudian peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat yaitu dengan cara memberi informasi dan sosialisasi bagi masyarakat dengan kegiatan salah satu contohnya: dengan kegiatan ibu-ibu PKK. Adapun perlunya pelatihan yang merupakan dasar ilmu pengetahuan pertama yang diperlukan bagi ibu-ibu yang melakukan usaha dalam kelompok PKK.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 pukul 14.00 WIB dengan ibu Juniarti selaku Masyarakat yang mengikuti kegiatan UMKM mengatakan bahwa sumber daya yang diberikan pemerintah sudah cukup baik. Adapun Peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat yaitu dengan cara memanggil masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah mengenai usaha UMKM yang diadakan rutin setiap bulannya. Kemudian sangat perlu adanya pelatihan karena pelatihan itu merupakan ilmu yang harus kami ketahui dan ilmu baru bagi kami seorang pekerja.

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2018 pukul 15.00 WIB dengan bapak Narman selaku pemilik UMKM, beliau mengatakan mengatakan bahwa sumber daya yang diberikan pemerintah sudah cukup baik. Adapun Peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat yaitu dengan cara memanggil masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah mengenai usaha UMKM yang diadakan rutin setiap bulannya. Sangat perlu adanya pelatihan karena pelatihan itu merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pekerja.

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut untuk menyampaikan dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan seperti (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas maupun informasi dan wewenang) sejauh ini sumber daya yang diberikan pemerintah dalam bentuk fasilitas sudah terlaksana dengan baik. Tetapi

SDM kurang efektif karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan dalam melakukan kegiatan UMKM.

Menurut Edwards III (2006:150) untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja. Serta di berikannya sumber daya anggaran dana dan fasilitas oleh pemerintah sudah pasti implementasi kebijakan tersebut terlaksana dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan seperti SDM kurang berjalan dengan efektif, sehingga masih banyak masyarakat yang menginginkan adanya pelatihan.

3. Disposisi/sikap

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 09:00 WIB dengan bapak Budiono selaku Kepala Desa Suka Raja mengatakan mengatakan tanggung jawab sudah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, adapun bentuk dukungan dari masyarakat yaitu menerima dengan baik kebijakan ini dan ketika ada sosialisasi mengenai Usaha Kecil Menengah masyarakat dengan senang hati datang pada saat ada sosialisasi pembinaan. Kemudian bentuk dukungan masyarakat menerima dan membeli usaha yang dibuat oleh anggota

UMKM dan dukungan dari kepala desa memberikan motivasi dan memberikan wadah untuk saling berbagi informasi bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 10:00 WIB dengan ibu Elyanora Nasution selaku Kepala PKK mengatakan tanggung jawab sudah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk dukungan ibu-ibu PKK selalu ramai mengikut hadir dalam kegiatan UMKM dan menerapkannya di rumah dan memberitahu kepada tetangga yang lain. Adapun bentuk dukungan masyarakat yaitu menerima dan membeli usaha dari ibu-ibu PKK yang melakukan UMKM.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 pukul 14.00 WIB dengan ibu Juniarti selaku Masyarakat yang mengikuti kegiatan UMKM mengatakan mengatakan tanggung jawab sudah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk dukungan masyarakat menerima dan membeli usaha yang mereka lakukan dan dukungan dari kepala desa memberikan motivasi dan memberikan wadah untuk saling berbagi informasi bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2018 pukul 15.00 WIB dengan bapak Narman selaku pemilik UMKM, beliau mengatakan mengatakan tanggung jawab sudah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk dukungan masyarakat menerima dan membeli usaha yang mereka lakukan dan dukungan dari kepala desa memberikan motivasi dan memberikan wadah untuk saling berbagi informasi bagi pelaku UMKM.

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut tanggung jawab sudah berjalan dengan baik, karena adanya dukungan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan UMKM.

Menurut Edwards III (2006:150) untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan serta harus adanya proses pengawasan agar terlaksananya tugas secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku/sikap tanggung jawab dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih perlu adanya pengawasan agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses dan pencapaian tujuan yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 09:00 WIB dengan bapak Budiono selaku Kepala Desa Suka Raja berkaitan dengan struktur birokrasi yaitu, menurut beliau struktur pelaksanaan tentang

pengelolaan UMKM sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Struktur biasanya tergantung pada pekerjaan yang dilakukan, sejauh ini pegawai bekerja dengan baik dan teratur. Kemudian organisasi yang beliau ikuti yaitu PKK, apalagi PKK desa Suka Raja cukup aktif dalam melakukan usaha kecil menengah.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 10:00 WIB dengan ibu Elyanora Nasution selaku Kepala PKK berkaitan dengan struktur birokrasi yaitu, menurut beliau struktur pelaksanaan tentang pengelolaan UMKM sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Menurut beliau struktur pelaksanaan tentang pengelolaan UMKM sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, karena di organisasi PKK tempat beliau sudah ada bagian kerja dan pegawai pendataannya. Kemudian organisasi yang beliau ikuti yaitu PKK, apalagi PKK desa Suka Raja cukup aktif dalam melakukan usaha kecil menengah

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 pukul 14.00 WIB dengan ibu Juniarti selaku Masyarakat yang mengikuti kegiatan UMKM bahwasanya beliau tidak mengetahui struktur pelaksanaan tentang pengelolaan UMKM dikarenakan hanya seorang pekerja.

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2018 pukul 15.00 WIB dengan bapak Narman selaku pemilik UMKM bahwasanya beliau tidak mengetahui struktur pelaksanaan tentang pengelolaan UMKM dikarenakan hanya seorang pekerja.

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana

hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil wawancara terkait dengan struktur birokrasi tersebut sudah berjalan dengan baik, karena adanya struktur birokrasi sudah berjalan baik didesa kecamatan Suka Raja.

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward III (2006:153) yaitu: 1) *Standard Operational Procedures* (SOP) adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya. 2) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

5. Industri Kreatif

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 09:00 WIB dengan bapak Budiono selaku Kepala Desa Suka Raja berkaitan dengan industri kreatif beliau mengatakan bahwa unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan didesa Suka Raja sejauh ini masih mengandalkan makanan yang bersifat tradisional tetapi sudah di modifikasi dan sejauh ini sudah dilakukan oleh masyarakat desa Suka Raja.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 10:00 WIB dengan ibu Elyanora Nasution selaku Kepala PKK berkaitan dengan

berkaitan dengan industri kreatif beliau mengatakan bahwa unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan didesa Suka Raja sejauh ini masih mengandalkan makanan yang bersifat tradisional tetapi sudah dilakuakn modifikasi beerupa bentu dan rasa kemudian sejauh ini sudah dilakukan oleh masyarakat desa Suka Raja.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 pukul 14.00 WIB dengan ibu Juniarti selaku Masyarakat yang mengikuti kegiatan UMKM mengatakan industri kreatif sudah dijalankan dengan baik oleh pemilik usaha tetapi makanannya masih dalam bentuk tradisional.

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2018 pukul 15.00 WIB dengan bapak Narman selaku pemilik UMKM, beliau mengatakan mengatakan industri kreatif sudah dijalankan dengan baik oleh pemilik usaha tetapi makanannya masih dalam bentuk tradisional.

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut sudah berjalan dengan baik, karena pemilik Usaha didesa Suka Raja sudah menerapkan industri kreatif.

Simatupang (2008 :69) juga menjelaskan bahwa industri kreatif adalah industri yang mengandalkan talenta, ketrampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui

penawaran kreasi intelektual. Sementara itu, di kalangan para pakar dalam bidang tersebut, nampaknya tidak ada perbedaan pengertian yang mendasar antara Ekonomi Kreatif dengan Industri Kreatif. Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis, sebenarnya bukan merupakan persoalan yang serius. Secara umum dapat dikatakan bahwa keduanya mengandung pengertian sebagai aktivitas berbasis kreativitas yang berpengaruh terhadap perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.

6. SDM Yang Lebih Maju

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 09:00 WIB dengan bapak Budiono selaku Kepala Desa Suka Raja berkaitan dengan SDM beliau mengatakan dilakukan pembinaan rutin, agar SDM bisa lebih maju dalam menggunakan alat-alat mesin, karena biasanya kami menggunakan alat-alat tradisonal.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 10:00 WIB dengan ibu Elyanora Nasution selaku Kepala PKK, untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih kreatif dan maju dilakukan pembinaan rutin tiap bulannya dengan mendatangkan mentor yang ahli untuk memberikan pengetahuan atau motivasi lebih bagi ibu-ibu PKK dan memberikan pelatihan pelatihan yang diadakan rutin setiap bulannya dikantor camat.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 pukul 14.00 WIB dengan ibu Juniarti selaku Masyarakat yang mengikuti kegiatan UMKM mengatakan untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih kreatif dan maju biasanya dilakukan pembinaan rutin, agar SDM bisa lebih maju dalam

menggunakan alat-alat mesin, karena biasanya kami menggunakan alat-alat tradisional. Dan memberikan pelatihan atau motivasi setiap bulan seperti pelatihan bagaimana melakukan usaha yang baik dan menggunakan beberapa alat yang diberikan oleh kepala desa.

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2018 pukul 15.00 WIB dengan bapak Narman selaku pemilik UMKM. Untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih kreatif dan maju biasanya dilakukan pembinaan rutin, agar SDM bisa lebih maju dalam menggunakan alat-alat mesin, karena biasanya kami menggunakan alat-alat tradisional. Dan memberikan pelatihan atau motivasi bagaimana melakukan usaha yang baik dan menggunakan beberapa alat yang diberikan oleh kepala desa.

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut sudah berjalan dengan baik karena sudah dilakukan pembinaan rutin, dan sudah memberikan pelatihan atau motivasi agar SDM bisa lebih maju.

Ndraha (1999) Sumber daya manusia berkualitas tinggi ialah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif generative inovatif dengan menggunakan energy tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination: tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.

7. UMKM Yang Kompeten

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 09:00 WIB dengan bapak Budiono selaku Kepala Desa Suka Raja mengatakan untuk UMKM yang kompeten dalam menyikapi perubahan atau kemauan konsumen dipasar dapat diterima dengan baik, asalkan usaha berjalan dengan baik. Dan untuk Keterampilan/ Konsistensi Produk yang menjadi pembeda dengan Produk lainnya konsistensi rasa dan penampilan tentunya harus dipertahankan.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 10:00 WIB dengan ibu Elyanora Nasution selaku Kepala PKK mengatakan untuk UMKM yang kompten dalam menyikapi perubahan atau kemauan konsumen di pasar kemauan konsumen tidak terlalu susah, biasanya mereka menginginkan rasa dan penampilan yang bagus saja. Dan untuk Keterampilan/ Konsistensi Produk yang menjadi pembeda dengan Produk lainnya konsistensi rasa dan penampilan tentunya harus dipertahankan.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 pukul 14.00 WIB dengan ibu Juniarti selaku Masyarakat yang mengikuti kegiatan UMKM mengatakan perbedaan usaha yang kami lakukan paling berdasarkan rasanya, konsumen pastinya menyukai rasa yang enak dan penampilan yang menarik. Dan untuk Keterampilan/ Konsistensi Produk yang menjadi pembeda dengan Produk lainnya konsistensi dari segi rasa dan penampilan yang dipertahankan.

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2018 pukul 15.00 WIB dengan bapak Narman selaku pemilik UMKM. Untuk menjadi pembeda usaha yang kami lakukan biasanya berdasarkan rasa, konsumen pastinya menyukai rasa yang enak dan penampilan yang menarik. Dan untuk keterampilan/ Konsistensi Produk yang menjadi pembeda dengan Produk lainnya konsistensi dari segi rasa dan penampilan yang dipertahankan.

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut sudah berjalan dengan baik. Dengan memberikan konsistensi dari segi rasa dan penampilan yang dipertahankan untuk menjadi pembeda dengan Produk lainnya.

Gordo (1988- 109) UMKM yang kompeten adalah UMKM yang memiliki kecakapan atau keterampilan. Kecakapan atau keterampilan sudah dimiliki para pelaksana UMKM di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih dengan memberikan konsistensi dari segi rasa dan penampilan yang dipertahankan untuk menjadi pembeda dengan Produk lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Adapun proses penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yaitu tidak adanya penyampaian informasi kebijakan untuk masyarakat.
2. Adapun dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan seperti (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas maupun informasi dan wewenang). Sejauh ini sumber daya yang diberikan pemerintah dalam bentuk fasilitas sudah terlaksana dengan baik.
3. Adapun tanggung jawab sudah berjalan dengan baik, karena adanya dukungan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan UMKM di Desa Sukaraja.
4. Kemudian terkait dengan struktur birokrasi tersebut sudah berjalan dengan baik, karena adanya struktur birokrasi sudah berjalan baik didesa kecamatan Suka Raja.
5. Adapun terkait dengan industri kreatif tersebut sudah berjalan dengan baik, karena adanya struktur birokrasi sudah berjala baik didesa kecamatan Suka Raja.

6. Adapun terkait dengan SDM yang lebih maju tersebut sudah berjalan dengan baik karna sudah dilakukan pembinaan rutin, dan sudah memberikan pelatihan atau motivasi agar SDM bisa lebih maju.
7. Adapun terkait dengan UMKM yang kompeten tersebut sudah berjalan dengan baik. Dengan memberikan konsistensi dari segi rasa dan penampilan yang dipertahankan untuk menjadi pembeda dengan Produk lainnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Adapun proses penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM di Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yaitu tidak adanya penyampaian informasi kebijakan untuk masyarakat masih perlu adanya pembinaan dan sosialisasi agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan.
2. Adapun saran dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan seperti (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas maupun informasi dan wewenang) sejauh ini sumber daya yang diberikan pemerintah dalam bentuk fasilitas sudah terlaksana dengan baik. Tetapi SDM kurang efektif karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan dalam melakukan kegiatan UMKM.
3. Adapun saran terhadap tanggung jawab harus lebih ditingkatkan agar menghasilkan masyarakat yang maju dan berkompeten, masih perlu adanya

pengawasan agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses dan pencapaian tujuan yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

4. Adapun saran terkait dengan struktur birokrasi harus lebih ditingkakan agar setiap struktur birokrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
5. Adapun saran mengenai industri kreatif harus lebih ditingkatkan agar menghasilkan UMKM yang lebih maju.
6. Adapun saran terkait dengan SDM yang lebih maju harus lebih ditingkatkan lagi, kemudian pembinaan dan pelatihan harus lebih ditingkatkan agar menghasilkan masyarakat yang lebih baik dalam melakukan UMKM.
7. Adapun saran terkait dengan UMKM yang kompeten harus lebih ditingkatkan agar menghasilkan suatu produk yang berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Anderson, James. E, 2003, *Publik Policy Making*, Houghton Mifflin Company, USE
- Budiarjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Gajah Mada University Press, Jakarta
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2009. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2010-2014*. Jakarta: Departemen Perdagangan.
- Edwards III . George, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly, Inc, Washington.
- Grindle, M.S, 1980, *Politics And Policy Implemeantation In The Third World*, New Jersey: Princeton University Press.
- Hasibuan, Malayu, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Komaruddin, 2006, *Pengembangan dan Pelatihan*, Kappa-Sigma, Bandung.
- Moleong, Lexy, 2007, *Metodologo Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi : Jakarta. Bumi Aksara.
- Mathis Robert, L, dan Jackson Jhon, H, 2006, *Human Resourcse Management*, Salemba Empat, Jakarta.
- Robert L. Mathis – John H. Jackson. *Human Resource Management*, edisi 10, Jakarta : Salemba Empat, 2006.
- Solly, Lubis, 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Sastradipoera, Komaruddin, 2002. *Menejemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Fungsi Operatif*. Bandung : Kappa Sigma.
- Simatupang, M.T. 2008. *Industri Kreatif untuk Kesejahteraan Bangsa*. ITB Bandung: Inkubator Industri dan Bisnis

Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD, Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Lukman offset dan yayasan pembauan administrasi public Indonesia, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Analisis Kebijakan Edisi Kedua*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Werther, William B. & Keith Davis. 1996. *Human Resources And Personal Management*. International Edition. McGraw-Hill, Inc., USA.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Peraturan Daerah Kab. Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu-Bara.

Biodata Narasumber

Nama : Budiono

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Agama : Islam

Jabatan : Kepala Desa

Umur : 48 Tahun

Kategorisasi I : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

A. Adanya Penyampaian Informasi

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan tentang Pengelolaan UMKM?

Jawab : Iya, saya mengetahui kebijakan ini.

2. Bagaimana bentuk penyampaian informasi/komunikasi yang diberikan Dinas kepada Desa Sukaraja mengenai UMKM?

Jawab : cara penyampaian informasi melalui surat yang diberikan dari dinas Koperasi yang kemudian dibagikan pada setiap desa yang ada di kecamatan Air Putih

3. Dan apa bentuk solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Batu-Bara mengenai permasalahan UMKM?

Jawab : bentuk solusi yang diberikan pemerintah adalah dalam bentuk dana, kemudian tersedianya alat, dan pelatihan

B. Sumber Daya

1. Apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan kegiatan UMKM ini? Apa sumber daya alam cukup membantu dalam kegiatan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : sudah cukup, tetapi dalam pengelolaannya kami belum terlalu bisa mengembangkan sebab ilmu mengenai usaha yang kami miliki belum terlalu banyak.

2. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM, sejauhmana peran Pemerintah Kabupaten Batu-Bara melibatkan masyarakat?

Jawab : Peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat yaitu dengan cara memanggil masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah mengenai usaha kecil yang diadakan rutin setiap bulannya.

3. Menurut Bapak/Ibu perlukah adanya Pelatihan/Bimbingan dari Kabupaten Batu-Bara untuk mendorong sumber daya manusia untuk lebih berkreaitif dalam melakukan usaha?

Jawab : Sangat perlu karena pelatihan itu merupakan dasar ilmu yang digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka.

C. Disposisi/Sikap

1. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan masyarakat terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM?

Jawab : bentuk dukungan yaitu menerima dengan baik kebijakan ini dan ketika ada sosialisasi mengenai Usaha Kecil Menengah masyarakat dengan senang hati datang ke sosialisasi pembinaan.

2. Bagaimana bentuk dukungan masyarakat dan Kepala Desa Sukaraja terhadap usaha yang Bapak/Ibu jalani sekarang?

Jawab : bentuk dukungan masyarakat menerima dan membeli usaha yang dibuat oleh anggota UMKM dan dukungan dari kepala desa memberikan motivasi dan memberikan wadah untuk saling berbagi informasi bagi pelaku umkm.

3. Siapa yang pertama kali membuat usaha atau memikirkan untuk melakukan usaha ini?

Jawab : pertama kali membuat usaha adalah masyarakat desa sukaraja yaitu Ibu-Ibu PKK.

D. Struktur Birokrasi

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Struktur Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya?

Jawab : menurut saya struktur pelaksanaan tentang pengelolaan UMKM sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Bagaimana Struktur/Tahapan kerja pegawai Bapak? Dalam bekerja ?

Jawab : struktur biasanya tergantung pada pekerjaan yang dilakukan, sejauh ini pegawai bekerja dengan baik dan teratur.

3. Apakah Bapak/Ibu mempunyai organisasi/mengikuti sebuah organisasi (di Kabupaten/Kecamatan)

Jawab : organisasi yang saya ikuti yaitu PKK, apalagi PKK desa Suka Raja cukup aktif dalam melakukan usaha kecil menengah.

Kategorisasi II : Pengembangan UMKM

A. Industri Kreatif

1. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM berpengaruh atau tidak dengan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Perda tersebut memang kami kurang mengetahui, karena dengan adanya arahan dari kepala desa usaha ini cukup berpengaruh.

2. Motivasi apa yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja Bapak/Ibu agar Kreatif dalam bekerja?

Jawab : Motivasinya biasanya dalam bentuk uang tambahan, apalagi jika usaha terjual laku keras.

3. Apa motivasi yang sudah diberikan Pemerintah Kabupaten Batu-Bara dan Pihak Kecamatan Air Putih untuk Industri Bapak/Ibu Agar menjadi Industri yang Kreatif?

Jawab : Motivasi biasanya dalam bentuk dana dan alat-alat perlengkapan untuk melakukan usaha.

B. SDM Yang Lebih Maju

1. Apa saja yang sudah dilakukan/ diberikan Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih Kreatif dan Maju dalam melaksanakan UMKM?

Jawab : biasanya dilakukan pembinaan rutin, agar SDM bisa lebih maju dalam menggunakan alat-alat mesin, karena biasanya masyarakat menggunakan alat-alat tradisional.

2. Apakah Bapak/Ibu memilih atau memberikan syarat bagi SDM yang ingin bekerja di tempat Bapak/Ibu?

Jawab : tidak, karena setiap masyarakat membutuhkan pekerjaan agar tidak terjadi pengangguran.

3. Sebagai pemilik usaha apakah Bapak/Ibu memberikan pelatihan/motivasi khusus untuk menjadi SDM yang lebih maju?

Jawab : pelatihan dalam melakukan usaha kecil menengah cukup rutin dilakukan didesa kami.

C. UMKM Yang Kompeten

1. Sebagai pelaku usaha UMKM yang konsisten dan memiliki keterampilan. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi perubahan atau kemauan konsumen di pasar?

Jawab : menyikapi perubahan atau kemauan konsumen dipasar pastinya diterima dengan baik, asalkan usaha berjalan dengan baik.

2. Apa yang membedakan hasil usaha Bapak atau produk untuk menjadi pilihan konsumen di pasar?

Jawab : Perbedaan usaha yang kami lakukan paling berdasarkan rasanya, konsumen pastinya menyukai rasa yang enak dan penampilan yang menarik.

3. Keterampilan/Konsistensi apa yang Bapak berikan pada Produk tersebut untuk menjadi pembeda dengan Produk lainnya? Dan menjadi pilihan di pasaran?

Jawab : sudah saya katakana tadi konsistensi rasa dan penampilan tentunya kami pertahankan.

HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu-Bara.

Biodata Narasumber

Nama : Elyanora Nasution

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Jabatan : Ketua PKK

Umur : 52 tahun

Kategorisasi I : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

E. Adanya Penyampaian Informasi

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan tentang Pengelolaan UMKM?

Jawab : Iya, saya mengetahui kebijakan ini dari pegawai dinas yang mensosialisasikan di kecamatan saya.

5. Bagaimana bentuk penyampaian informasi/komunikasi yang diberikan Dinas kepada Desa Sukaraja mengenai UMKM?

Jawab : cara penyampaian informasi melalui surat yang diberikan dari dinas Koperasi yang kemudian di sosialisasikan dengan mengundang ibu PKK dan ibu-ibu yang melakukan usaha UMKM.

6. Dan apa bentuk solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Batu-Bara mengenai permasalahan UMKM?

Jawab : bentuk solusi yang diberikan pemerintah adalah dalam bentuk ilmu pengetahuan dari sosialisasi kemudian memberikan alat, dan pelatihan.

F. Sumber Daya

4. Apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan kegiatan UMKM ini? Apa sumber daya alam cukup membantu dalam kegiatan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Dari ibu-ibu yang mengikuti sosialisasi dan PKK, belum semua mencukupi sumber daya alamnya dari berbagi sektor yang ada di daerahnya.

5. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM, sejauhmana peran Pemerintah Kabupaten Batu-Bara melibatkan masyarakat?

Jawab : Peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat yaitu dengan cara memberi informasi dan sosialisasi bagi masyarakat dengan kegiatan salah satu contohnya: dengan kegiatan ibu-ibu PKK.

6. Menurut Bapak/Ibu perlukah adanya Pelatihan/Bimbingan dari Kabupaten Batu-Bara untuk mendorong sumber daya manusia untuk lebih berkreaitif dalam melakukan usaha?

Jawab : Sangat perlu karena pelatihan itu merupakan dasar ilmu pengetahuan pertama yang di perlukan bagi ibu-ibu yang melakukan usaha dalam kelompok PKK saya.

G. Disposisi/Sikap

4. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan masyarakat terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM?

Jawab : bentuk dukungan ibu-ibu PKK selalu ramai mengikut hadir dalam kegiatan saya dan menerapkannya di rumah dan memberitahu kepada tetangganya.

5. Bagaimana bentuk dukungan masyarakat dan Kepala Desa Sukaraja terhadap usaha yang Bapak/Ibu jalani sekarang?

Jawab : bentuk dukungan masyarakat menerima dan membeli usaha dari ibu-ibu PKK saya, dan terkadang usaha merekalah yang menjadi cemilan saat acara PKK berlangsung.

6. Siapa yang pertama kali membuat usaha atau memikirkan untuk melakukan usaha ini?

Jawab : kalau soal itu saya kurang ingat, karena banyak dari ibu-ibu kades yang mempromosikannya pada saya.

H. Struktur Organisasi

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah Struktur Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya?

Jawab : menurut saya struktur pelaksanaan tentang pengelolaan UMKM sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, karena di organisasi PKK tempat ibu sudah ada bagian kerja dan pegawai pendataannya.

5. Bagaimana Struktur/Tahapan kerja pegawai Bapak? Dalam bekerja ?

Jawab : kalau soal itu ibu kurang mengetahuinya.

6. Apakah Bapak/Ibu mempunyai organisasi/mengikuti sebuah organisasi (di Kabupaten/Kecamatan)

Jawab : punya, dan selain PKK kecamatan ibu juga mengikuti kegiatan PKK Kabupaten.

Kategorisasi II : Pengembangan UMKM

D. Industri Kreatif

4. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM berpengaruh atau tidak dengan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Perda tersebut sangat mempengaruhi karena dengan adanya perda No 11 ini jadi banyak ibu-ibu yang mempunyai wawasan baru.

5. Motivasi apa yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja Bapak/Ibu agar Kreatif dalam bekerja?

Jawab : Motivasinya biasanya dengan ucapan dan datan ke tempat usaha mereka.

6. Apa motivasi yang sudah diberikan Pemerintah Kabupaten Batu-Bara dan Pihak Kecamatan Air Putih untuk Industri Bapak/Ibu Agar menjadi Industri yang Kreatif?

Jawab : Motivasi dari kabupaten dengan mendatangkan peleku UMKM yang sudah sukses menjadi mentor di kegiatan PKK di Kecamatan AIR PUTIH.

E. SDM Yang Lebih Maju

4. Apa saja yang sudah dilakukan/ diberikan Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih Kreatif dan Maju dalam melaksanakan UMKM?

Jawab : biasanya dilakukan pembinaan rutin tiap bulannya dengan mendatangkan mentor yang ahli untuk memberikan pengetahuan atau motivasi lebih bagi ibu-ibu PKK

5. Apakah Bapak/Ibu memilih atau memberikan syarat bagi SDM yang ingin bekerja di tempat Bapak/Ibu?

Jawab : kalau soal itu ibu kurang tahu, tapi menurut ibu tidak ada syarat.

6. Sebagai pemilik usaha apakah Bapak/Ibu memberikan pelatihan/motivasi khusus untuk menjadi SDM yang lebih maju?

Jawab : pelatihan diadakan rutin setiap bulannya dikantor camat

F. UMKM Yang Kompeten

4. Sebagai pelaku usaha UMKM yang konsisten dan memiliki keterampilan. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi perubahan atau kemauan konsumen di pasar?

Jawab : biasanya kemauan konsumen tidak terlalu susah, biasanya mereka menginginkan rasa dan penampilan yang bagus saja.

5. Apa yang membedakan hasil usaha Bapak atau produk untuk menjadi pilihan konsumen di pasar?

Jawab : yang membedakan usaha produk kecamatan Air Putih dengan kecamatan lain kualitas rasa yang menjadi selalu utama, dan kegiatan PKK di Kabupaten selalu di mintai Buk Bupati atau Ibuk Sekda selalu cemilan dari Kecamatan Air Putih.

6. Keterampilan/Konsistensi apa yang Bapak berikan pada Produk tersebut untuk menjadi pembeda dengan Produk lainnya? Dan menjadi pilihan di pasaran?

Jawab : sudah saya katakan tadi konsistensi rasa dan penampilan tentunya kami pertahankan.

HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu-Bara.

Biodata Narasumber

Nama : Juniarti

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Umur : 46

Kategorisasi I : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

I. Adanya Penyampaian Informasi

7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan tentang Pengelolaan UMKM?

Jawab : Kurang mengetahui kebijakan ini.

8. Bagaimana bentuk penyampaian informasi/komunikasi yang diberikan Dinas kepada Desa Sukaraja mengenai UMKM?

Jawab : cara penyampaian informasi melalui sosialisasi dan mendatangi tempat kami kerja.

9. Dan apa bentuk solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Batu-Bara mengenai permasalahan UMKM?

Jawab : bentuk solusinya dengan memberi pelatihan dan sosialisasi bagi kami.

J. Sumber Daya

7. Apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan kegiatan UMKM ini? Apa sumber daya alam cukup membantu dalam kegiatan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : tidak ada pekerjaan lagi, dan rasa saya sumber alam cukup mencukupi.

8. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM, sejauhmana peran Pemerintah Kabupaten Batu-Bara melibatkan masyarakat?

Jawab : Peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat yaitu dengan cara memanggil masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah mengenai usaha UMKM yang diadakan rutin setiap bulannya.

9. Menurut Bapak/Ibu perlukah adanya Pelatihan/Bimbingan dari Kabupaten Batu-Bara untuk mendorong sumber daya manusia untuk lebih kreatif dalam melakukan usaha?

Jawab : Sangat perlu karena pelatihan itu merupakan ilmu yang harus kami ketahui dan ilmu baru bagi kami seorang pekerja.

K. Disposisi/Sikap

7. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan masyarakat terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM?

Jawab : bentuk dukungan kami yaitu menerima dengan baik peraturan Daerah No 11 ini.

8. Bagaimana bentuk dukungan masyarakat dan Kepala Desa Sukaraja terhadap usaha yang Bapak/Ibu jalani sekarang?

Jawab : bentuk dukungan masyarakat menerima dan membeli usaha yang kami lakukan dan dukungan dari kepala desa memberikan motivasi dan memberikan wadah untuk saling berbagi informasi bagi pelaku umkm.

9. Siapa yang pertama kali membuat usaha atau memikirkan untuk melakukan usaha ini?

Jawab : saya rasa pak boss.

L. Struktur Organisasi

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah Struktur Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya?

Jawab : kalau saya kurang tahu ya, maklum hanya pekerja.

8. Bagaimana Struktur/Tahapan kerja pegawai Bapak? Dalam bekerja ?

Jawab : struktur biasanya tergantung pada pekerjaan yang dilakukan, permintaan pasar dan pak boss.

9. Apakah Bapak/Ibu mempunyai organisasi/mengikuti sebuah organisasi (di Kabupaten/Kecamatan)

Jawab : kalau saya tidak ada.

Kategorisasi II : Pengembangan UMKM

G. Industri Kreatif

7. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM berpengaruh atau tidak dengan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : rasa saya tidak terlalu berpengaruh.

8. Motivasi apa yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja Bapak/Ibu agar Kreatif dalam bekerja?

Jawab : biasanya dalam bentuk uang tambahan, apalagi jika usaha terjual laku keras.

9. Apa motivasi yang sudah diberikan Pemerintah Kabupaten Batu-Bara dan Pihak Kecamatan Air Putih untuk Industri Bapak/Ibu Agar menjadi Industri yang Kreatif?

Jawab : Motivasi biasanya dalam bentuk dana dan alat-alat perlengkapan untuk melakukan usaha.

H. SDM Yang Lebih Maju

7. Apa saja yang sudah dilakukan/ diberikan Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih Kreatif dan Maju dalam melaksanakan UMKM?

Jawab : biasanya dilakukan pembinaan rutin, agar SDM bisa lebih maju dalam menggunakan alat-alat mesin, karena biasanya kami menggunakan alat-alt tradisonal.

8. Apakah Bapak/Ibu memilih atau memberikan syarat bagi SDM yang ingin bekerja di tempat Bapak/Ibu?

Jawab : saya rasa tidak ada, hanya di tanya asal saya dari mana.

9. Apakah pemilik usaha apakah Bapak/Ibu memberikan pelatihan/motivasi pada pegawai yang bekerja?

Jawab : setiap bulan sering megadakan pelatihan bagaimana melakukan usaha yang baik dan menggunakan beberapa alat yang diberikan oleh kepala desa.

I. UMKM Yang Kompeten

7. Sebagai pelaku usaha UMKM yang konsisten dan memiliki keterampilan. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi perubahan atau kemauan konsumen di pasar?

Jawab : menyikapi perubahan atau kemauan konsumen dipasar pastinya diterima dengan baik, asalkan bahan selalu ada di pasar.

8. Apa yang membedakan hasil usaha Bapak atau produk untuk menjadi pilihan konsumen di pasar?

Jawab : Perbedaan usaha yang kami lakukan paling berdasarkan rasanya, konsumen pastinya menyukai rasa yang enak dan penampilan yang menarik.

9. Keterampilan/Konsistensi apa yang Bapak berikan pada Produk tersebut untuk menjadi pembeda dengan Produk lainnya? Dan menjadi pilihan di pasaran?

Jawab : saya rasa dari segi rasa dan penampilan tentunya kami pertahankan.

HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu-Bara.

Biodata Narasumber

Nama : Narman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pemilik UMKM

Umur : 53 Tahun

Kategorisasi I : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu-Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

M. Adanya Penyampaian Informasi

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan tentang Pengelolaan UMKM?

Jawab : Tidak, saya tidak mengetahui kebijakan ini.

11. Bagaimana bentuk penyampaian informasi/komunikasi yang diberikan Dinas kepada Desa Sukaraja mengenai UMKM?

Jawab : cara penyampaian informasi melalui sosialisasi dan mendatangi tempat kami kerja.

12. Dan apa bentuk solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Batu-Bara mengenai permasalahan UMKM?

Jawab : bentuk solusinya dengan memberi pelatihan dan sosialisasi bagi kami tapi saya tidak ikut dengan kegiatan solusinya.

N. Sumber Daya

10. Apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan kegiatan UMKM ini? Apa sumber daya alam cukup membantu dalam kegiatan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Di Usia yang sudah tua ini lah yang bisa saya kerjakan, dan rasa saya sumber alam cukup mencukupi.

11. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM, sejauhmana peran Pemerintah Kabupaten Batu-Bara melibatkan masyarakat?

Jawab : Peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat yaitu dengan cara memanggil masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah mengenai usaha UMKM yang diadakan rutin setiap bulannya.

12. Menurut Bapak/Ibu perlukah adanya Pelatihan/Bimbingan dari Kabupaten Batu-Bara untuk mendorong sumber daya manusia untuk lebih kreatif dalam melakukan usaha?

Jawab : Sangat perlu karena pelatihan itu merupakan ilmu baru yang abgus untuk saya.

O. Disposisi/Sikap

10. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan masyarakat terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM?

Jawab : bentuk dukungan kami yaitu menerima dengan baik peraturan Daerah No 11 ini.

11. Bagaimana bentuk dukungan masyarakat dan Kepala Desa Sukaraja terhadap usaha yang Bapak/Ibu jalani sekarang?

Jawab : bentuk dukungan masyarakat menerima dan membeli usaha yang kami lakukan dan dukungan dari kepala desa memberikan motivasi dan memberikan wadah untuk saling berbagi informasi bagi pelaku umkm.

12. Siapa yang pertama kali membuat usaha atau memikirkan untuk melakukan usaha ini?

Jawab : saya rasa pak boss.

P. Struktur Organisasi

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah Struktur Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolan UMKM sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya?

Jawab : kalau saya kurang tahu ya, maklum hanya pekerja dan sudah tua.

11. Bagaimana Struktur/Tahapan kerja pegawai Bapak? Dalam bekerja ?

Jawab : struktur biasanya tergantung pada pekerjaan yang di inginkan konsumen atau dengan produksi biasa kami lakukan.

12. Apakah Bapak/Ibu mempunyai organisasi/mengikuti sebuah organisasi (di Kabupaten/Kecamatan)

Jawab : kalau saya tidak ada mengikutin organisasi apa pun.

Kategorisasi II : Pengembangan UMKM

J. Industri Kreatif

10. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan UMKM berpengaruh atau tidak dengan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : rasa saya tidak terlalu berpengaruh.

11. Motivasi apa yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja Bapak/Ibu agar Kreatif dalam bekerja?

Jawab : biasanya dalam bentuk uang tambahan, apalagi jika usaha terjual laku keras.

12. Apa motivasi yang sudah diberikan Pemerintah Kabupaten Batu-Bara dan Pihak Kecamatan Air Putih untuk Industri Bapak/Ibu Agar menjadi Industri yang Kreatif?

Jawab : Motivasi biasanya dalam bentuk dana dan alat-alat perlengkapan untuk melakukan usaha.

K. SDM Yang Lebih Maju

10. Apa saja yang sudah dilakukan/ diberikan Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih Kreatif dan Maju dalam melaksanakan UMKM?

Jawab : biasanya dilakukan pembinaan rutin, agar SDM bisa lebih maju dalam menggunakan alat-alat mesin, karena biasanya kami menggunakan alat-alat tradisonal.

11. Apakah Bapak/Ibu memilih atau memberikan syarat bagi SDM yang ingin bekerja di tempat Bapak/Ibu?

Jawab : saya rasa tidak ada.

12. Apakah pemilik usaha apakah Bapak/Ibu memberikan pelatihan/motivasi pada pegawai yang bekerja?

Jawab : setiap bulan sering megadakan pelatihan bagaimana melakukan usaha yang baik dan menggunakan beberapa alat yang diberikan oleh kepala desa.

L. UMKM Yang Kompeten

10. Sebagai pelaku usaha UMKM yang konsisten dan memiliki keterampilan. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi perubahan atau kemauan konsumen di pasar?

Jawab : menyikapi perubahan atau kemauan konsumen dipasar pastinya diterima dengan baik, asalkan bahan selalu ada di pasar.

11. Apa yang membedakan hasil usaha Bapak atau produk untuk menjadi pilihan konsumen di pasar?

Jawab : Perbedaan usaha yang kami lakukan paling berdasarkan rasanya, konsumen pastinya menyukai rasa yang enak dan penampilan yang menarik.

12. Keterampilan/Konsistensi apa yang Bapak berikan pada Produk tersebut untuk menjadi pembeda dengan Produk lainnya? Dan menjadi pilihan di pasaran?

Jawab : saya rasa dari segi rasa dan penampilan tentunya kami pertahankan.